



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

GEDUNG SUTIKNO SLAMET LANTAI 8, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1 JAKARTA 10710 KOTAK POS 2435 JKP 10024
TELEPON (021) 3451028 FAKSIMILE (021) 3450430 SITUS www.anggaran.depkeu.go.id

Nomor : S- 1797 /AG/2017
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pengesahan Revisi Anggaran VI BMKG TA 2017

6 September 2017

Yth. 1. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Sistem Perbendaharaan
2. Sekretaris Utama BMKG

Jakarta

Sehubungan dengan surat Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KU.102/038/SU/VIII/2017 Tanggal 28 Agustus 2017 hal Usulan Revisi Anggaran (Relokasi Satker), dan Nomor KU.102/039/RO.I/IX/2017 tanggal 4 September 2017 hal Perbaikan Data Usulan Revisi Anggaran, dengan ini disampaikan:

1. Usulan Revisi Anggaran telah disahkan dan Database RKA-K/L DIPA pada Kementerian Keuangan telah diperbaharui.
2. Dengan pengesahan Revisi Anggaran ini, Kode Pengaman (*Digital Stamp*) DIPA Petikan yang digunakan sebagai dasar transaksi berubah menjadi sebagaimana *terlampir*.
3. Dalam rangka memenuhi kebutuhan administrasi, Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala KPPN agar mengunduh PDF File DIPA Petikan Revisi sebagai dasar untuk mencetak DIPA Petikan Revisi sebagaimana tercantum dalam notifikasi *terlampir*.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Direktur Jenderal Anggaran
Direktur Anggaran Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan,



Purwanto *mb*
NIP 196904211995011001

Tembusan :

1. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Direktur Pelaksanaan Anggaran;
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Propinsi Aceh;
5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Propinsi Sumatera Utara;
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Propinsi Kep. Bangka Belitung ;
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Propinsi Nusa Tenggara Timur;
8. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Propinsi Maluku;
9. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Propinsi Papua;